

The Voluntary Carbon Market **Explained**



**Bab 11:
Mengapa dan
bagaiman
Masyarakat Hukum
Adat dan Warga Lokal
(IP & LC) terlibat
dengan VCM?**

Bab 11: Mengapa dan bagaimana Masyarakat Hukum Adat dan Warga Lokal (IP & LC) terlibat dengan VCM?

Masyarakat Hukum Adat dan Warga Lokal (IP & LC) memiliki peran dalam pasar karbon sukarela (VCM) utamanya sebagai pemilik dan penjaga tanah tempat kegiatan VCM dikembangkan. IP & LC secara sukarela berpartisipasi dalam VCM sebagai pengembang proyek, mitra yang dikonsultasikan, dan penerima manfaat dari kegiatan dan hasil VCM. Dalam beberapa kasus, IP & LC secara tidak sengaja terlibat dalam VCM karena kegiatan yang dikembangkan di tanah mereka berjalan tanpa pelibatan atau pengakuan yang pantas atas hak-hak mereka. Partisipasi penuh dan adil dari IP & LC diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang kegiatan VCM di wilayah mereka. Pengembang aktivitas VCM, Lembaga standar emisi GRK, pembuat kebijakan atau pemerintah, dan pembeli kredit karbon dapat meningkatkan persyaratan dan praktik yang membagi manfaat selagi mengurangi risiko bagi IP & LC.

Mengapa IP & LC terlibat dalam VCM?

Wilayah IP & LC memiliki tingkat **penyimpanan karbon** dan keanekaragaman hayati yang **tinggi, menyediakan jasa ekosistem penting**, dan memiliki tingkat **deforestasi dan degradasi** yang

jauh lebih sedikit daripada daerah sekitarnya. Tanah Masyarakat Adat diperkirakan mencakup **setidaknya 36 persen** ekosistem hutan secara global. Pada tahun 2018, IP & LC diperkirakan mengelola **setidaknya 17 persen** – atau hampir 300 metrik ton – dari total karbon yang tersimpan di 64 negara, termasuk di semua wilayah hutan hujan primer (Gambar 11.1). Angka ini mungkin sebenarnya terlalu rendah. Di tingkat global, karbon yang tersimpan di lahan hutan tempat IP & LC memiliki hak hukum kira-kira sebesar **37,7 miliar ton**. Bergantung pada bagaimana hak tenurial atau kepemilikan lahan dialokasikan, lahan IP&LC memiliki potensi untuk menyerap **8,69 hingga 12,93 juta ton karbon dioksida** antara tahun 2020 dan 2050.

Jasa lingkungan iklim dan konservasi yang disediakan oleh lahan yang dikelola IP & LC tentunya menarik investasi VCM. Perlindungan dan pemulihan lahan IP&LC dapat menghasilkan kredit karbon melalui solusi berbasis alam (**Nbs**) yang juga memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan atau manfaat sosial lainnya. Beberapa kegiatan VCM menghasilkan kredit dengan mendukung hak dan kapasitas IP & LC untuk melindungi, mengelola, atau memulihkan ekosistem. Kredit

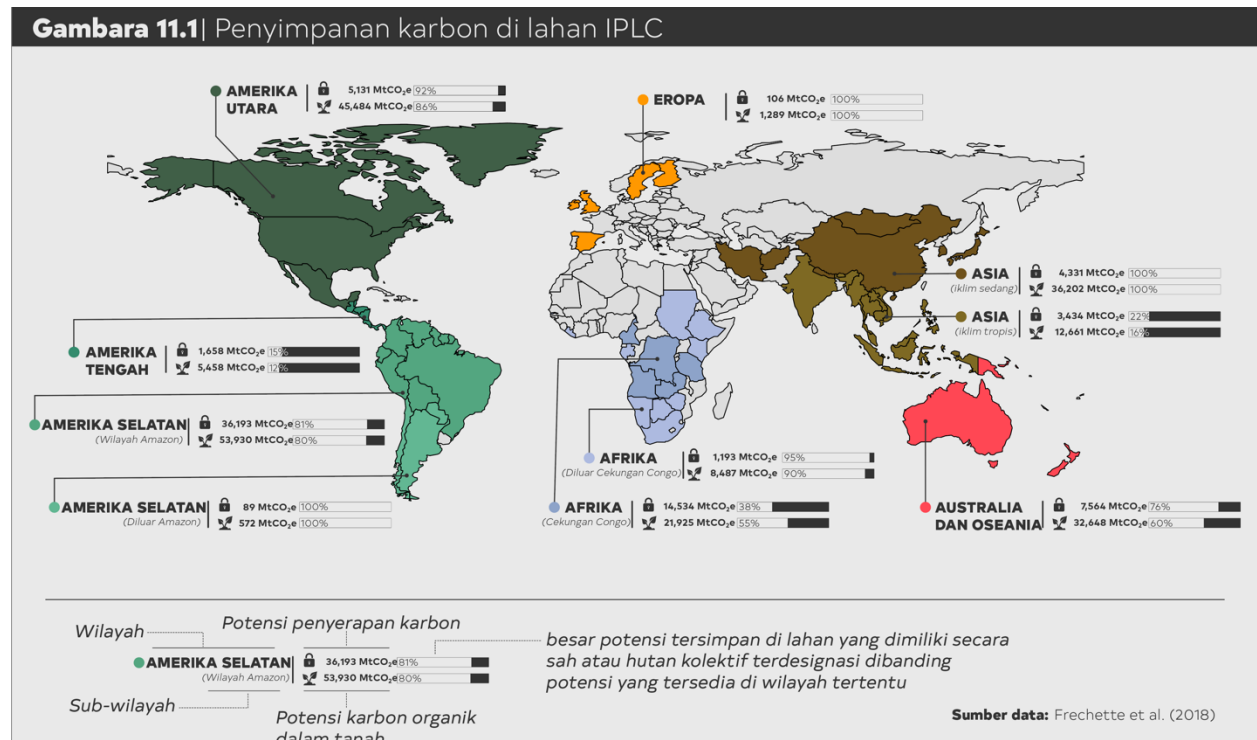
karbon dapat dihasilkan melalui kegiatan yang memperkuat hak kepemilikan lahan, memberikan pendidikan dan mata pencaharian, dan mendukung implementasi rencana pengelolaan wilayah IP & LC. Kegiatan VCM juga dapat bertujuan untuk mengubah praktik yang merusak ekosistem dengan mengembangkan alternatif mata pencaharian yang lebih baik atau mendukung pembangunan berkelanjutan.

IP & LC dapat memilih untuk mengembangkan kegiatan VCM sendiri atau dilibatkan oleh organisasi yang ingin mengembangkan kegiatan di wilayahnya. Ketika IP & LC memilih untuk mengembangkan kegiatan VCM atau masuk ke dalam pengaturan pembagian manfaat melalui proses konsultatif yang mengikuti persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, VCM dapat mengakomodasi kebutuhan dan visi misi mereka. Ada juga kasus di mana IP & LC secara tidak sengaja terlibat dalam kegiatan VCM karena kegiatan VCM sedang dikembangkan di tanah mereka tanpa persetujuan mereka. Hal ini tentunya merampas hak-hak IP & LC dan menimbulkan risiko bagi keberhasilan jangka panjang kegiatan VCM tersebut.

Bagaimana IP &LC terlibat dalam VCM?

IP & LC berperan dalam VCM ketika kegiatan VCM dikembangkan di lahan yang mereka kelola atau gunakan. IP & LC seringkali terlibat dalam kegiatan VCM melalui proses konsultasi dan **pengaturan pembagian manfaat**. Dalam



beberapa kasus, IP & LC mungkin aktif sebagai pengembang aktivitas, atau terlibat langsung dalam desain dan implementasi aktivitas VCM. Ada juga kasus keterlibatan paksa, di mana aktivitas VCM berdampak pada IP & LC yang tidak diajak berkonsultasi dengan tepat dari awal.

Konsultasi

Beberapa standar dan metodologi karbon VCM mengharuskan masyarakat lokal untuk diajak berkonsultasi dalam pengembangan kegiatan. Pengembang kegiatan VCM harus menunjukkan kepatuhan terhadap hak Masyarakat Adat atas PADIATAPA atau FPIC sebagaimana disyaratkan oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP*). PADIATAPA memberi Masyarakat Adat hak untuk memberikan atau menunda persetujuan dari kegiatan yang akan berdampak kepada mereka atau berlangsung di wilayah mereka. Pengembang aktivitas VCM juga perlu menunjukkan bahwa mereka melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal dan kelompok rentan lainnya yang tidak dilindungi oleh UNDRIP. **Proses validasi dan verifikasi VCM** meninjau kepatuhan pengembang terhadap persyaratan konsultasi.

Pembagian manfaat

Pengembang VCM harus membuat perjanjian pembagian

manfaat dengan IP & LC yang terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas VCM. Kegiatan VCM berkualitas tinggi salah satunya termasuk pembagian manfaat dari kegiatan NbS dan kegiatan lainnya yang berdampak pada IP & LC. Perjanjian pembagian manfaat dapat memberikan pembayaran langsung kepada IP & LC atau memberikan dukungan sebagaimana dibutuhkan seperti infrastruktur layaknya sekolah atau jalan, pendidikan atau pengembangan mata pencaharian alternatif, atau penguatan hak dan kepemilikan lahan. Pemerintah negara tuan rumah dapat menetapkan persyaratan pembagian manfaat yang harus diikuti oleh pengembang VCM. Perihal terdaftar dalam rencana pembagian manfaat yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berarti hak atas karbon kepada IP & LC diberikan.

Pengembangan aktivitas

Dalam kasus di mana IP & LC memegang hak atas hutan dan tanah secara formal, mereka dapat mengklaim hak atas karbon dan secara langsung mengembangkan kegiatan VCM di wilayah mereka. Ini berarti bahwa organisasi, kelompok, atau individu yang termasuk IP & LC dapat turut menentukan desain, implementasi, dan ketentuan penerbitan serta penggunaan kredit karbon VCM. Sebagian besar kegiatan VCM yang dikelola oleh IP & LC berfokus pada NbS. IP & LC dapat memilih untuk mengembangkan kegiatan VCM

untuk membiayai upaya perlindungan ekosistem mereka sendiri, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat tapak atau rencana pengelolaan teritorial, dan memperkuat hak kepemilikan lahan.

Kegiatan VCM yang dikelola IP & LC telah dikembangkan **di bawah standar emisi GRK** Verra dan Plan Vivo serta di bawah beberapa standar pasar karbon yang bersifat wajib. *The Architecture for REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus) Transactions' The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART/TREES)* membuka pendaftaran program REDD+ yang dikembangkan di wilayah adat hingga akhir 2030. Namun, hingga Agustus 2023, tidak ada program

berbasis yurisdiksi dan adat telah dikembangkan di bawah ART/TREES.

Karena kompleksitas teknis pengembangan aktivitas VCM, ada beberapa kegiatan VCM yang dikelola oleh IP & LC. Selain itu, sebagian besar negara gagal untuk sepenuhnya mengakui atau memformalkan hak atas karbon dan **hak atas tanah** IP & LC, yang membatasi kemampuan kelompok-kelompok ini untuk mengembangkan kegiatan VCM secara mandiri. Dalam kebanyakan kasus di mana IP & LC adalah pengembang VCM, mereka biasanya bekerja dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memberikan dukungan teknis dan membantu perdagangan kredit karbon.

Kotak 11.1. Manfaat dan tantangan proyek karbon yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat

Proyek karbon hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dapat memberikan manfaat finansial dan hak kepemilikan atau hak kelola bagi masyarakat hukum adat. Namun, keberhasilan proyek-proyek yang dipimpin oleh Masyarakat Hukum Adat harus tunduk pada kekuatan tata kelola dan pengakuan hukum masyarakat adat di yurisdiksi tempat proyek-proyek karbon hutan berlangsung. Contoh dari Amerika Serikat, Kolombia, dan Brasil menunjukkan beberapa kasus manfaat dan tantangan tersebut.

Suku **Yurok** di dataran rendah Lembah Sungai Klamath di California (Amerika Serikat) menjual kontrak 100 tahun untuk *offseting* di bawah **program offset California**. Yurok telah menggunakan penjualan kontrak ini untuk membayar dan memulihkan lahan kayu di wilayah leluhur mereka. Kredit karbon dihasilkan berdasarkan berkurangnya panen kayu dan revitalisasi pengelolaan hutan yang mengurangi kebakaran hutan.

Masyarakat hukum adat yang diwakili oleh Dewan Adat Regional Amazonia Tengah (Kolombia) telah menerima pendapatan yang stabil dari pembelian kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek REDD+ yang mereka kembangkan. Komunitas masyarakat ini mengatakan bahwa pendapatan dari kredit karbon memungkinkan mereka untuk melestarikan hutan dan menghindari mata

pencaharian ilegal atau yang yang tidak berkelanjutan. Namun, ada **kekhawatiran** sekarang bahwa mereka akan kehilangan akses ke sumber pendapatan ini karena pemerintah Kolombia berusaha untuk mengambil kendali lebih besar atas kegiatan pasar karbon.

Proyek Karbon Hutan REDD+ Suruí di Pará, Brasil adalah proyek karbon hutan pertama yang dipimpin oleh masyarakat adat. Disertifikasi di bawah Verified Carbon Standard (VCS), proyek ini menghasilkan hampir 300.000 kredit karbon dari 2009-2014. Kredit tersebut dimiliki oleh asosiasi Suruí dan penjualan kredit masuk ke dalam Dana Suruí. Orang-orang Paiter-Suruí **menggunakan** hasil dari penjualan kredit tersebut untuk mendukung pertahanan wilayah mereka, menunjang pemerintahan di tapak, dan mendukung ketahanan pangan. Namun, pada tahun 2014 dan 2016, emas dan berlian ditemukan di wilayah Paiter-Suruí. Beberapa anggota masyarakat mendukung izin untuk kegiatan ekstraktif, dengan alasan bahwa penambangan dan pertambangan memberikan lebih banyak pendapatan daripada perlindungan hutan. Penambangan ilegal juga dimulai dan kegiatan pertanian mengikuti. Sanksi dan penambangan dan pertanian ilegal mengakibatkan lebih sedikit kredit karbon yang diterbitkan sehingga akhirnya **proyek Suruí ditangguhkan oleh Verra**. Proyek Karbon Hutan Suruí **rusak** karena perpecahan internal, pendapatan yang tidak mencukupi dari karbon, kolusi antara pemimpin Suruí dan penambang, dan kurangnya dukungan dari pemerintah Brasil untuk hak-hak Paiter-Suruí.

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana masyarakat hukum adat dapat memperoleh manfaat langsung sebagai pengembang proyek dan bahwa lingkungan tata kelola yang stabil juga diperlukan untuk memastikan manfaat sosial dan lingkungan dari kegiatan karbon secara jangka panjang. Yurok berada dalam posisi yang relatif unik terkait hak manajemen jangka panjang mereka yang terjamin, atau dapat ditegakkan. Pengembang proyek REDD+ berbasis masyarakat hukum adat di Kolombia dan Brasil menghadapi kondisi tata kelola dan politik yang tidak stabil yang secara tiba-tiba dapat menyebabkan hilangnya akses ke pendanaan karbon.

Keterlibatan tak disengaja

Dalam beberapa kasus, IP & LC secara **tidak sengaja terlibat** dalam kegiatan VCM. Ini kemungkinan besar terjadi jika kepemilikan lahan tidak jelas dan tata kelola lemah.

Sebagian besar lahan tempat kegiatan NbS VCM dikembangkan berada di daerah di mana kepemilikan atau hak penggunaan lahan untuk IP & LC belum diakui atau diformalkan. Pemerintah dapat memberikan pengembang

VCM hak atas lahan di mana IP & LC sebenarnya sudah memiliki klaim yang tidak diakui oleh negara, atau mereka sudah menggunakan sumber daya di lahan VCM tersebut tetapi tidak menghuni lahan, atau mereka pernah mereka pernah menghadapi permasalahan terkait hak yang diselesaikan secara ilegal. Dalam kasus lain, **pengembang yang tidak bijak** menjalankan aktivitas VCM tanpa mengikuti

proses konsultasi yang tepat atau tanpa meyakinkan IP & LC untuk berpartisipasi dalam aktivitas VCM sehingga mengakibatkan mereka **kehilangan kepemilikan, hak, atau akses** ke sumber daya dari lahan. Beberapa standar emisi GRK memiliki prosedur perlindungan untuk menghindari pengembangan kegiatan VCM tanpa berkonsultasi dengan IP & LC, tetapi masih ada risiko keterlibatan IP & LC tanpa persetujuan, terutama di daerah terpencil dengan tata kelola rendah.

Bagaimana kegiatan VCM dapat menambah manfaat selagi mengurangi risiko terhadap IP &LC?

Kurangnya hak yang diakui secara hukum dapat mengakibatkan keterlibatan IP & LC yang tidak memadai, **pembagian manfaat** yang lemah untuk mereka, dan pencabutan hak atau pengusuran IP &LC.

Langkah paling penting untuk memastikan bahwa VCM memberi manfaat dan mengurangi risiko terhadap IP &LC adalah mengembangkan kegiatan VCM yang dipimpin oleh masyarakat dan berdasarkan pengetahuan dan inovasi lokal. **Forum Karbon Pribumi Nasional Australia atau National Indigenous Carbon Forum** menyerukan kepada Pemilik Tradisional lahan tempat proyek karbon dikembangkan untuk diperlakukan sebagai mitra

yang setara dan untuk kegiatan pasar karbon hanya membuat klaim tentang manfaat masyarakat adat jika dan ketika IP & LC adalah jelas mitra dan penerima manfaat. Pengembang aktivitas VCM harus memperhatikan tuntutan dari kelompok dan organisasi IP & LC tersebut untuk menciptakan kegiatan yang benar-benar menguntungkan IP &LC.

Pengembang aktivitas VCM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas VCM memberikan manfaat dan menghindari risiko. Mereka dapat melakukan ini dengan mempertimbangkan **dan mengakui** hak atas tanah, sumber daya, dan karbon IP &LC sejak awal pengembangan aktivitas VCM. Ini termasuk mengakui klaim atas adat dan leluhur serta penggunaan tanah dan sumber daya, yang mungkin tidak diakui secara formal dalam hukum. Di banyak daerah, perampasan tanah warisan, pengusiran paksa, dan konflik mengakibatkan tanah yang dimiliki atau diklaim oleh IP & LC dikendalikan oleh pemerintah atau pemilik tanah swasta lainnya. Pengembang aktivitas VCM harus responsif terhadap klaim ini dalam menentukan bagaimana mengalokasikan hak atas karbon dan struktur perjanjian pembagian manfaat. Pengembang aktivitas dapat mendukung IP & LC dalam mengakses layanan hukum untuk memperjelas hak atas tanah dan karbon.

Pengembang aktivitas VCM harus mengalokasikan dan menginvestasikan waktu dan sumber daya keuangan yang cukup untuk membangun kepercayaan dan melakukan konsultasi penuh dengan IP & LC. Melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Konsultasi dan PADIATAPA atau FPIC diperlukan untuk mengembangkan kegiatan dan perjanjian pembagian manfaat dengan IP & LC dalam rangka mencapai tujuan iklim jangka panjang. Jika konsultasi belum dilakukan dengan tepat, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi bahwa kebutuhan IP & LC tidak akan dipenuhi oleh kegiatan VCM dan tujuan dari kegiatan tersebut (misalnya, menghindari hilangnya hutan, mengubah mata pencaharian, mengamankan kepemilikan lahan) tidak akan tercapai atau bersifat berkelanjutan. Konsultasi tentang kegiatan, hasil, harapan, perubahan, dan pencapaian haruslah transparan. Konsultasi yang tepat memungkinkan IP & LC untuk menolak partisipasi dalam kegiatan VCM atau menginisiasi amandemen pada kegiatan VCM.

Lembaga standar emisi GRK dapat memberi manfaat dan mengurangi risiko terhadap IP & LC dengan memberikan panduan dan perlindungan khusus untuk konsultasi dan pembagian manfaat. Hal ini mencakup melembagakan persyaratan dan

prosedur untuk penilaian dampak hak asasi manusia untuk REDD+ dan kegiatan NbS lainnya. Standar emisi GRK juga dapat meningkatkan aksesibilitas platform, metodologi, dan prosedur keluhan mereka untuk IP & LC. Hal ini akan memudahkan IP & LC untuk memimpin sebagai pengembang aktivitas.

Pemerintah dapat meningkatkan manfaat dan mengurangi risiko terhadap IP & LC dengan memberikan IP & LC hak atas sumber daya alam atau mengakui peran mereka sebagai penjaga ekosistem. Pemerintah juga dapat memperjelas bagaimana hak atas karbon dan pasar karbon akan berlaku di masa depan, sehingga memberikan stabilitas bagi pengembang IP & LC dan VCM untuk mengembangkan kegiatan. Jika IP & LC memiliki kepemilikan lahan atau sumber daya lain yang jelas dan aman, mereka dapat menjadi pengembang aktivitas VCM dan menggunakan pembiayaan kredit karbon untuk mendukung aktivitas mereka terkait pengelolaan lahan, mata pencaharian, dan tata kelola.

Pembeli kredit karbon dapat melakukan penilaian pengujian secara tuntas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa kredit yang mereka peroleh dihasilkan oleh kegiatan VCM yang mengikuti semua aturan perlindungan sosial dan memberi manfaat bagi IP & LC. Kredit karbon dengan label yang menunjukkan manfaat sosial — seperti label yang dikeluarkan oleh

Climate, Community, and Biodiversity Standard atau *Gold Standard for the Global Goals* — cenderung lebih mendukung hak dan kebutuhan IP & LC.

Ketika keterlibatan dilakukan secara efektif, kegiatan VCM dapat memperkuat posisi IP & LC dalam menegosiasikan, menjamin, dan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya. Pada akhirnya, ketika IP & LC memiliki hak atas tanah dan hak atas hutan yang terjamin, mereka dapat melawan konversi dan degradasi ekosistem, sehingga menguntungkan masyarakat dan tujuan mitigasi perubahan iklim.

Bacaan lebih lanjut

Almås, O., & Merope-Synge, S. (2023). *Carbon Markets, Forests and Rights: An Introductory Series*. Retrieved from <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/carbon-markets-forests-rights-explainer>

Frechette, A., Ginsburg, C., & Walker, W. (2018). *A Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands*. Retrieved October 13, 2021, from https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRL_Sept-2018.pdf

Garcia, B., Rimmer, L., Canal Vieira, L., & Mackey, B. (2021). *REDD+ and forest protection on indigenous lands in the Amazon*. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 30(2), 207–219.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/reel.12389>

Lofts, K., Frechette, A., & Kumar, K. (2021). *Status of Legal Recognition of Indigenous Peoples', Local Communities' and Afro-descendant Peoples' Rights to Carbon Stored in Tropical Lands and Forests*. Retrieved September 30, 2021, from

<https://rightsandresources.org/publication/carbon-rights-brief/>

Reyes-García, V., Fernández-Llamazares, Á., Aumeeruddy-Thomas, Y., Benyei, P., Bussmann, R. W., Diamond, S. K., et al. (2022). *Recognizing Indigenous peoples' and local communities' rights and agency in the post-2020 Biodiversity Agenda*. *Ambio*, 51(1), 84–92.

Sarmiento Barletti, J. P., & Larson, A. M. (2017). *Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation: A preliminary review and proposal for moving forward*. Retrieved August 13, 2023, from <https://www.cifor.org/library/6630/rights-abuse-allegations-in-the-context-of-redd-readiness-and-implementation-a-preliminary-review-and-proposal-for-moving-forward/>

World Resources Institute & Climate Focus. (2022). *Sink or swim: How Indigenous and community lands can make or break nationally determined contributions*. Retrieved from <https://forestdeclaration.org/resources/sink-or-swim/>

Zwick, S. (2019, March 25). *The Story of the Surui Forest Carbon Project*. *Forest Trends*. Retrieved September 28, 2023, from <https://www.forest-trends.org/blog/the-story-of-the-surui-forest-carbon-project/>

Ucapan Terima Kasih

Penulis: Melaina Dyck, Charlotte Streck, dan Danick Trouwloon

Desainer: Sara Cottle

Kontributor: Darragh Conway, Leo Mongendre, Pablo Nuñez, Laura Carolina Sepúlveda, dan Theda Vetter

Terjemahan ke Bahasa Indonesia: Bruce Mecca

Tanggal publikasi: Oktober 2023

Voluntary Carbon Market Explained (VCM Primer) didukung oleh *Climate and Land Use Alliance (CLUA)*. Para penulis berterima kasih kepada pengulas dan mitra yang dengan murah hati menyumbangkan pengetahuan dan keahlian untuk *Primer* ini.